

Masyarakat Sipil Global dan Aktivisme Transnasional: Studi Kasus “The Dalit Women’s Movement” di India

Galuh Anissa Sekar Ayu

*Program Studi Ilmu Hubungan Internasional, Universitas Brawijaya
Indonesia*

e-mail: galuhskaro4@gmail.com

ABSTRACT

This study aims to analyze the efforts of The Dalit Women’s Movement initiated by feminist movements and Dalit communities in India. The author will examine the transnational advocacy process in response to the Indian government's failure to accommodate the basic rights of Dalit women. The article will also outline several achievements successfully accomplished by The Dalit Women’s Movement as a manifestation of global civil society discourse. In this study, the author employs the Transnational Advocacy Network (TAN) theory introduced by Keck and Sikkink. The method used in this research is a qualitative descriptive method. The research findings indicate that the strategies of the Dalit women's movement meet the criteria of TAN outlined by Keck and Sikkink, including information politics, symbolic politics, leverage politics, and accountability politics. Thus, transnational advocacy by activists carried out over the years ultimately yielded results, as evidenced by behavioral changes by the target actor, namely the Government of India.

Kata Kunci: Advokasi, Diskriminasi, India, Perempuan Dalit, Transnasional

Studi ini bertujuan untuk menganalisis upaya The Dalit Women’s Movement yang digagas oleh gerakan feminsis dan komunitas Dalit di India. Penulis akan mengkaji proses advokasi transnasional dalam merespons kegagalan pemerintah India untuk mengakomodasi hak-hak dasar perempuan Dalit. Artikel ini juga akan menjabarkan sejumlah pencapaian yang berhasil dilakukan oleh The Dalit Women’s Movement sebagai manifestasi dari wacana masyarakat sipil global. Dalam studi ini, penulis menggunakan teori Transnational Advocacy Network (TAN) yang diperkenalkan oleh Keck dan Sikkink. Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode deskriptif kualitatif. Hasil penelitian menunjukkan bahwa strategi gerakan perempuan Dalit memenuhi kriteria TAN yang dikemukakan Keck dan Sikkink, di antaranya information politics, symbolic politics, leverage politics, dan accountability politics. Dengan demikian, advokasi transnasional oleh para aktivis yang dilakukan selama bertahun-tahun pada akhirnya membuahkan hasil dibuktikan dengan perubahan perilaku oleh target aktor, yakni Pemerintah India.

Keywords: Advocacy, Discrimination, India, Dalit Women, Transnational

Pendahuluan

Di era kontemporer yang ditandai oleh integrasi jaringan masyarakat, partisipasi sipil, dan mobilisasi sosial yang meningkat, beragam isu menjadi lebih terkoneksi. Arus komunikasi transnasional juga menambah kompleksitas proses politik dan sosial serta menawarkan cara baru untuk berinteraksi dengan masyarakat. Pola komunikasi tersebut mereorientasikan kembali peta relasi antara publik lokal dengan gerakan sosial global (Edelman, 2001). Hal ini mengindikasikan bahwa hubungan antaraktor tidak terbatas pada ruang geografis tertentu, melainkan mencakup jaringan yang meluas di berbagai tingkatan—lokal hingga global. Merujuk pada pernyataan sebelumnya, terminologi masyarakat sipil global hadir sebagai perpanjangan tangan bagi minoritas, perempuan, dan masyarakat sipil lain (Anheier, Glasius, dan Kaldor, 2001). Romantisasi wacana masyarakat sipil global termanifestasi dalam banyak gerakan spontan abad ini. Salah satunya adalah gerakan solidaritas perempuan yang menyebar dengan cepat seiring dengan bertambah kompleksnya permasalahan domestik yang dialami oleh perempuan.

Perkara diskriminasi berbasis gender, sorotan publik banyak berfokus pada interseksi ketimpangan perempuan Dalit yang bermuara pada gerakan feminis paling fenomenal pada masanya, yakni *The Dalit Women’s Movement* (Zelliot, Eleanor, 2001). Perempuan Dalit menyuarakan penderitaan yang kaumnya terima atas penindasan dan eksploitasi berlapis akibat adanya dominasi yang timbul berdasarkan kasta, kelas sosial, dan gender. Sebagai negara dengan angka populasi pemeluk Hindu terbesar di dunia, yakni mencapai 94.17%, hierarki kasta di India merupakan masalah struktural yang terus melanggengkan opresi atas perempuan Dalit (Bahadur, 2020).

Setidaknya, terdapat empat kasta yang diakui dalam sistem sosial dan keagamaan Hindu di India, di antaranya Brahmana (pendeta), Ksatria (prajurit), Waisya (pedagang), dan Sudra (budak atau pekerja). Sementara itu, Dalit tidak termasuk ke dalam empat kasta legal yang ditetapkan masyarakat dan pemerintah India (Bahadur, 2020). Bahkan, orang-orang dalit dikonsiderasi sebagai komunitas kelas bawah yang membawa dampak buruk bagi masyarakat. Merujuk pada pemikiran empiris Zelliot, Dalit merepresentasikan “*People who are crushed, deliberately trampled upon by the social group above them*” (Zelliot, 2001).

Meskipun hukum di India mengkategorikan kekerasan sebagai tindak kejahatan yang dapat diadili, diskriminasi terhadap Dalit, khususnya Perempuan, terus berlanjut dalam berbagai bentuk. Beberapa bentuk diskriminasi yang dialami, seperti diskriminasi upah, boikot ekonomi dan sosial, diskriminasi pekerjaan dan pendidikan, hingga bermuara pada tindak kekerasan secara fisik (54,8%), verbal (62,4%), seksual (46,8%), kekerasan domestik (43%), dan pemerkosaan (23,2%). (Ghose, 2003). Terlebih, perempuan Dalit harus menghadapi diskriminasi tambahan karena gender, dan beberapa kasus seperti Manusmriti yang secara eksplisit membenarkan tindakan kejam terhadap mereka. Manusmriti merupakan manuskrip yang menjelaskan bagaimana penganut Hindu harus menjalani hidupnya sesuai dengan Dharma, yakni kewajiban, agama, dan hukum yang berlaku. Kebiasaan sosial dan praktik keagamaan pemeluk Hindu sering kali menjadi justifikasi kekerasan terhadap perempuan Dalit. Misalnya, devadasi (pelacuran kuil) yang memperbolehkan gadis-gadis Dalit untuk dinikahkan kepada tetua desa. Kemudian, gadis-gadis tersebut akan dieksploitasi secara seksual oleh tetua desa dengan kasta yang lebih tinggi dari Dalit (Gautam, 2014). Kebiasaan ini telah berlangsung dalam periode yang panjang sehingga menjadi sulit untuk diatasi.

Studi mikro menunjukkan bahwa wanita Dalit adalah korban utama dalam kekerasan terhadap komunitas Dalit, yakni dengan total 27.070 kasus per tahun 2006 di seluruh

India. Dr. Ambedkar, pakar politik, hukum, dan ekonomi India, berpendapat bahwa wanita adalah pintu gerbang sistem kasta. Artinya, sangat penting untuk mengadvokasi hak-hak perempuan dan menolak keras sistem kasta yang justru membatasi ruang gerak mereka. Bagi dirinya, kesetaraan gender merupakan bagian integral dari perjuangan dalam melawan ketidaksetaraan sosial secara keseluruhan, khususnya yang disebabkan oleh sistem kasta. All India Dalit Adhikar Manch (All India Dalit Rights Forum, 2007).

Penulis menilai kasus gerakan feminisme perempuan Dalit di India menjadi suatu urgensi yang dapat dibagi ke dalam beberapa penjelasan. Pertama, diskriminasi rasial pada perempuan Dalit di India merupakan permasalahan struktural. Kasus ini menjadi menarik terkait bagaimana aktivis transnasional mampu berkontribusi pada sengketa yang seharusnya memerlukan penanganan secara *top-down* tersebut. Kedua, kegagalan Pemerintah India dalam mengakui dan memberikan hak-hak perempuan Dalit mendorong terbentuknya gerakan yang menyelaraskan dirinya dengan nilai dan norma universal serta mengartikulasikan kepentingan domestiknya di forum solidaritas internasional. Urgensi pun timbul bagi penulis karena mengindikasikan kemungkinan adanya *boomerang pattern* dalam kasus tersebut. Ketiga, terdapat interseksi diskriminasi yang dibebankan kepada perempuan Dalit, hal ini menjadi juga urgensi terkait bagaimana masyarakat sipil global mampu memberi solusi atas diskriminasi yang saling tumpang tindih tersebut.

Merujuk pada penelitian sebelumnya yang berjudul “United Nations Women dan Isu Perempuan Dalit di India” karya Junita Christine Silitonga tahun 2022, kasta Dalit dalam masyarakat India disebut sebagai “*the untouchables*” atau mereka yang tidak terjangkau. Menurutnya, Dalit merupakan korban utama kekerasan yang diciptakan oleh sistem dan struktur. Melalui tulisannya, Junita menyajikan penelitian yang berfokus pada bagaimana UN Women berperan dalam menangani isu *triple discrimination* (gender, kasta, dan kelas sosial) yang dibebankan terhadap perempuan Dalit dalam kerangka organisasi internasional dan feminisme. Hasil penelitian Junita bermuara pada satu kesimpulan, yakni tidak efektifnya upaya UN Women sebagai salah satu organisasi internasional terkemuka di dunia. Alih-alih menysasar ketiga akar diskriminasi, program yang dilaksanakan sejak 2014 hingga 2019 ini tidak mampu mengupayakan penyelesaian (Silitonga, Junita Christine, 2021).

Berangkat dari hal tersebut, penulis ingin mengeksplorasi lebih jauh bagaimana peran advokasi transnasional melalui kerangka masyarakat sipil global dalam mengatasi diskriminasi perempuan Dalit di India. Hal tersebut tentu menarik untuk dibahas karena biasanya isu perempuan Dalit hanya dibahas dalam kerangka organisasi internasional (*state-centric*), sedangkan artikel ini akan menyoroti peran masyarakat sipil dalam praktiknya—yang bisa saja menghasilkan kesimpulan berbeda. Selain itu, penulis belum menemukan artikel terbaru yang benar-benar membahas terkait aktivisme transnasional terhadap gerakan perempuan Dalit yang terjadi pada beberapa tahun silam.

Dalam konteks The Dalit Women’s Movement, artikel ini bertujuan untuk mengeksplorasi proses aktivisme transnasional dalam memberikan tekanan pada pemerintah dalam negeri India untuk mengatasi isu perempuan Dalit. Penulis akan menjabarkan ke dalam tiga bagian. Pertama, penulis akan mendeskripsikan histori dan aktivitas The Dalit Women’s Movement. Kedua, penulis menganalisis *boomerang pattern* dan taktik advokasi transnasional The Dalit Women’s Movement. Terakhir, penulis akan memaparkan sejumlah pencapaian dan luaran yang dihasilkan selama

advokasi berjalan. Sehingga penulis merumuskan masalah terkait bagaimana advokasi transnasional berupaya mengubah konteks domestik perempuan Dalit di India?

Kajian Pustaka

Menurut Keck dan Sikkink (1999), terdapat konsep hubungan yang bersandar di atas antara ruang domestik dengan internasional. Hubungan tersebut bersifat *fluid* (dapat berubah atau dinamis) dan *open* (terbuka) antar aktor yang berkomitmen di atas isu yang spesifik. Lebih jauh, Keck dan Sikkink (1999) berpendapat bahwa hubungan intens antar aktor di tingkat domestik maupun global dapat membentuk sebuah jaringan baru. Keduanya kemudian menjelaskan bahwa proses internasionalisasi abad ke-20 lah yang kemudian membawa jalan bagi lahirnya *advocacy networks* (Keck, Margaret E, & Sikkink, K.,1999).

Jaringan advokasi (*advocacy networks*) merupakan terminologi yang digunakan untuk menyebut tindakan advokasi yang umumnya berupaya dalam melindungi atau mempertahankan suatu gagasan. Aktivitas advokasi bergerak secara terorganisasi untuk mempromosikan isu, ide, nilai, dan norma yang menjadi kepentingan aktivis. Sementara itu, aktivis merupakan "individu yang peduli pada sebuah isu dan mereka yang memperhitungkan sejumlah aksi dan biaya dalam mencapai tujuan mereka" (Oliver dan Marwell, 1992). Disebabkan tidak semua aktivis memiliki kekuatan yang memadai maka mereka cenderung mencari sumber daya dengan berjejaring dalam memperoleh informasi, visibilitas, akses yang lebih luas, dan lain sebagainya.

Sebagaimana dikemukakan oleh Keck dan Sikkink (1999), *Transnational Advocacy Network* (TAN) merupakan suatu strategi yang mengacu pada jaringan kolaboratif antar-organisasi dan individu di tingkat internasional yang bekerja bersama-sama untuk mengadvokasi perubahan dalam kebijakan atau isu tertentu di tingkat nasional maupun internasional. Jaringan ini terdiri dari organisasi non-pemerintah (NGO), kelompok advokasi, dan aktor-aktor lain yang saling berhubungan untuk mencapai tujuan bersama, seringkali menggunakan strategi seperti kampanye, pengaruh diplomasi, dan pertukaran informasi. Merujuk pada pemikiran empiris keduanya, terdapat beberapa aktor utama dalam jaringan advokasi. Menurut Keck dan Sikkink (1999), tidak semua aktor di bawah selalu memainkan peranan dalam aktivitas advokasi. Namun, satu hal yang dapat dipastikan adalah bahwa NGOs sering kali menjadi aktor kunci jaringan advokasi. NGOs lebih sering menjadi inisiator gerakan sosial dan mempunyai kemampuan untuk menggali kekuatan dari aktor penting lain. Keck, Margaret E, & Sikkink, K.,1999).

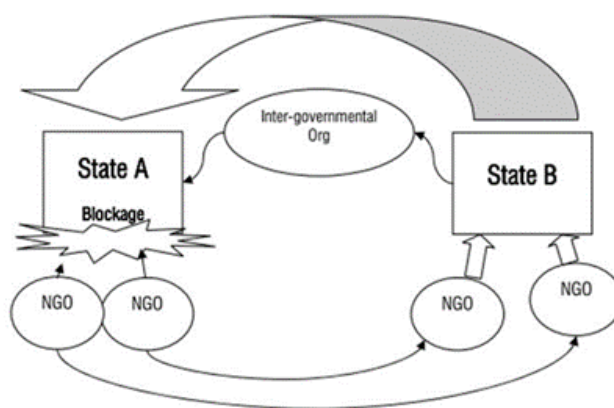
1. *Non-governmental Organizations (NGOs)*
2. Kelompok riset
3. Gerakan sosial lokal
4. Yayasan sosial
5. Kelompok keagamaan, serikat buruh, dan akademika
6. Anggota organisasi pemerintah internasional maupun regional
7. Anggota pemerintahan

Keck dan Sikkink dalam "*Transnational advocacy networks in international and regional politics*" menuliskan sebuah gagasan yang mereka sebut sebagai '*boomerang pattern*'. Asal gagasan ini bersandar pada penyelewengan hak masyarakat sipil. Pemerintah sebagai pelindung hak-hak dasar warga negara nyatanya bermain peran ganda sebagai perenggut hak tersebut. Kenyataan bahwa hak tidak terpenuhi dengan baik menjadi pendorong utama terbentuknya jaringan advokasi. Masyarakat sipil atau

kelompok domestik yang tidak diakui hak-hak nya oleh negara cenderung akan meminta bantuan internasional dalam mengeksperikan kepentingan dan melindungi mereka. (Keck, M E, & Sikkink, K. 1998).

Dalam banyak kasus, TAN banyak menghubungkan negara maju dengan berkembang. Tujuannya, agar TAN mampu memberikan dampak yang signifikan terhadap negara tujuan. Pada praktiknya, sebagaimana pada gambar di bawah, NGOs sering kali berupaya untuk mencari kawan di lingkungan internasional untuk memberi tekanan pada negara tersebut. Dengan kata lain, *'boomerang' pattern* merupakan karakteristik TAN yang aktivitasnya bertujuan untuk mengubah perilaku suatu negara. Kontak yang terbangun dengan koneksi internasional dapat *'memperkuat'* tuntutan kelompok domestik, membuka ruang untuk isu-isu baru, dan kemudian memantulkan tuntutan ini kembali ke dalam arena domestik.

Gambar 1. Boomerang Pattern dalam Transnational Advocacy Network (TAN)



Sumber: Keck dan Sikkink, 1999

Adapun indikator yang akan digunakan oleh penulis dari teori ini, di antaranya *information politics*, *symbolic politics*, *leverage politics*, dan *accountability politics*. *Information politics* merupakan kemampuan dalam menyampaikan informasi yang berkeadilan secara politis dengan cepat dan meyakinkan ke target yang disinyalir terdampak paling kecil. *Symbolic Politics* merupakan kemampuan untuk menggunakan simbol agenda, tindakan, atau cerita yang dapat dinalar dalam suatu situasi. *Leverage politics* merupakan kemampuan untuk mengundang aktor kuat agar dapat mempengaruhi situasi ketika aktor lainnya lebih lemah atau bahkan tidak mungkin memiliki pengaruh. Terakhir, *accountability politics* merupakan upaya untuk memaksa pemain yang lebih kuat bertindak sesuai dengan kebijakan atau prinsip-prinsip yang telah disepakati. (Keck, Margaret E, & Sikkink, K.,1999).

Dalam mengidentifikasi kemampuan jaringan advokasi dalam mempengaruhi subjek, Keck dan Sikkink memberikan sejumlah parameter yang dapat digunakan. Pertama, pembentukan isu dan *agenda setting* yang mengindikasikan jaringan telah menciptakan perhatian baru dalam sebuah isu. Selain itu, jaringan juga berhasil membentuk agenda yang bertujuan untuk memprovokasi massa pada isu yang sebelumnya belum terdengar dan dibicarakan. Kedua, jaringan berhasil mempengaruhi posisi negara, organisasi regional, hingga organisasi internasional. Jaringan dikatakan berhasil mempengaruhi posisi ini apabila mereka mempersuasi negara dan organisasi

untuk mendukung deklarasi internasional atau mengubah kebijakan domestik negaranya. Ketiga, jaringan mampu mempengaruhi prosedur internasional. Keempat, jaringan berhasil mempengaruhi kebijakan pada aktor tertentu, yakni negara, organisasi internasional dan regional, atau sektor privat. Kelima, jaringan mampu mempengaruhi perilaku negara. Pada tingkat akhir, perlu diketahui bahwa jaringan yang berhasil mendorong suatu negara dalam mengubah kebijakan domestiknya belum tentu berhasil mengubah perilaku negara kedepannya. Dengan kata lain, kebijakan resmi mungkin tidak dapat memprediksi apa pun tentang bagaimana para pelaku berperilaku dalam kenyataan. (Keck, Margaret E, & Sikkink, K.,1999).

Metode

Penelitian ini menggunakan metode kualitatif deskriptif dengan studi kasus. Metode tersebut dipilih untuk menjabarkan bagaimana histori, taktik, serta pencapaian yang dihasilkan dari jaringan advokasi transnasional dalam mengadvokasi hak-hak perempuan Dalit. Sementara itu, dalam studi kasus, peristiwa, masalah, proses, aktivitas, program, individu, atau beberapa individu diselidiki. Pada penelitian ini, sumber data yang digunakan adalah data primer dan data sekunder. Data primer didapatkan dengan merujuk langsung pada laporan resmi Pemerintah India dan dokumen negara. Kemudian, data sekunder diperoleh melalui sumber buku, jurnal, artikel dalam buku, halaman berita di internet, dan referensi lain yang berkaitan dengan topik penelitian (Creswell, 2014).

Hasil dan Pembahasan

Histori dan Pembentukan *The Dalit Women's Movement*

Gerakan perempuan Dalit di India dapat dilacak kemunculannya pada awal tahun 1990-an. Namun, jauh sebelum itu, perempuan Dalit diyakini memainkan peranan penting dalam sejumlah gerakan besar di India, yakni gerakan Ambedkarite dan Phule. Pada gerakan Ambedkarite, perempuan Dalit berkumpul untuk menyuarakan hak mereka terkait sistem kasta yang diskriminatif. Selama gerakan berlangsung, tidak sedikit dari masyarakat kasta Dalit yang memilih untuk pindah keyakinan ke Buddha. (Zelliot, 2001). Selain itu, gerakan Phule merupakan gerakan reformasi sosial di Maharashtra, India. Gerakan Phule dipimpin oleh Jyotirao Phule yang juga dianugerahi gelar kehormatan Mahatma oleh aktivis sosial di Maharashtra. Bukti bahwa perempuan Dalit aktif dalam gerakan pra kemerdekaan tersebut sekaligus memecah pertanyaan terkait peran mereka sebagai pemain kunci emansipasi wanita di India. Pasca kemerdekaan, tepatnya pada tahun 1947, terdapat dua gerakan sosial yang prominen di India, yaitu gerakan perempuan India dan gerakan kasta Dalit. Namun, kedua gerakan ini gagal menjawab tuntutan akar penindasan yang saling tumpang tindih antara gender dan kasta. (Edelman, M., 2001).

Identitas perempuan Dalit otonom pada awal tahun 1990-an membuka era bagi aktivis untuk menggalang perjuangan independen mereka sendiri dalam wacana gerakan sosial yang lebih luas di India. Dalam konteks ini, rentang tahun 1980-an hingga 1990-an, identitas feminis kulit berwarna dan feminis dunia ketiga semakin memperoleh tempat untuk menunjukkan eksistensinya. Pemimpin feminis Dalit, seperti Ruth Manorama dan Gail Omvedt terlebih dahulu mempertanyakan gagasan gerakan feminis 'universal'. Manorama mengangkat isu diskriminasi interseksi yang terjadi berdasarkan kelas,

kasta, dan gender (Gautam, 2014). Di sisi lain, Omvedt justru membicarakan tentang perempuan yang termarginalkan, khususnya perempuan Dalit. Dengan diakui pengaruh dan identitas perempuan Dalit yang otonom, beragam ruang dialog dan perserikatan dibentuk, di antaranya Federasi Nasional Perempuan Dalit (NFDW) dan All India Dalit Women's Forum. Selama periode ini, muncul berbagai organisasi perempuan Dalit regional yang bertujuan untuk memperjuangkan hak-hak perempuan Dalit di masing-masing negara bagian India, misalnya *Dalit Mahila Samiti* (DMS) dan *Maharashtra Dalit Mahila Sangathana*. Dengan demikian, perpotongan kasta dan gender muncul sebagai komponen penting dari gerakan feminis di India.

Ruang dialog *Dalit Mahila Samiti* (DMS) umumnya mengadvokasi hak-hak perempuan Dalit di Uttar Pradesh, tepatnya di bagian Utara India. Vanangana, sebuah NGO feminis yang berakar dari program pemerintah India Mahila Samakhya pada akhir tahun 1980-an, menjadi penyokong utama fondasi dan operasionalisasi DMS. Sementara itu, *Maharashtra Dalit Mahila Sangathana* terlibat dalam gerakan perempuan Dalit di negara bagian Maharashtra, India (Tamil Nadu Women's Forum (TNWF), 2007). MDMS berusaha untuk memperjuangkan hak-hak dan memberdayakan perempuan Dalit melalui pelatihan dan advokasi yang dipercaya dapat memperkuat posisi perempuan Dalit dalam masyarakat (Gautam, 2014).

Advokasi Transnasional dalam *The Dalit Women's Movement*

Keck dan Sikkink memaparkan bahwa advokasi merujuk pada tindakan yang berupaya untuk mempertahankan dan mempromosikan suatu gagasan. Tindakan tersebut terorganisir dengan baik guna mencapai tujuan dan kepentingan para aktivis. Sementara itu, transnasional merujuk pada gerakan yang lintas batas atau memungkinkan adanya dialog intensif antara aktor domestik dengan aktor global. Dalam rangka memperjuangkan kepentingan domestiknya, *The Dalit Women's Movement* di India dengan sadar menyelaraskan diri dengan jaringan advokasi lintas batas negara (transnasional). Adapun indikator yang digunakan untuk melihat taktik advokasi transnasional dalam gerakan perempuan Dalit, di antaranya *information politics*, *symbolic politics*, *leverage politics*, dan *accountability politics*.

Sebelum konferensi Beijing di Mumbai, Bangalore, dan Pune berlangsung pada tahun 1996, mobilisasi perempuan Dalit telah eksis terlebih dahulu. Seiring berjalannya advokasi di berbagai negara bagian India, gerakan lokal perempuan Dalit merasa perlu untuk menyelaraskan dirinya dengan jaringan transnasional. Sebagaimana Keck dan Sikkink (1999) sebutkan, aktivis yang merasa diri dan kelompoknya tidak mempunyai sumber daya yang memadai akan menggalang kekuatan dengan berjejaring. Gerakan perempuan Dalit di tingkat lokal, seperti *Dalit Mahila Samiti* (DMS) dan *Maharashtra Dalit Mahila Sangathan* berupaya untuk memperoleh visibilitas, akses, dan informasi yang lebih besar (Gautam, 2014).

Dalam praktiknya, *The Dalit Women's Movement* menggunakan strategi jejaring transnasional untuk memberi tekanan pada pemerintah yang enggan mengakui hak-hak dasar perempuan Dalit. Keck dan Sikkink menyebut pola yang muncul dalam fenomena gerakan perempuan Dalit di India sebagai '*Boomerang pattern*'. Pola bumerang merujuk pada kondisi ketika pemerintah tidak merespon atau cenderung gagal dalam mengatasi suatu isu (Ingole, 2020). Kelompok domestik yang menuntut, perempuan Dalit, memperkuat posisi mereka dengan melakukan kontak internasional. Dalam konteks *The Dalit Women's Movement*, jejaring internasional membantu dalam menggaungkan suatu isu yang tidak terselesaikan oleh Pemerintah India hingga akhirnya tuntutan atas

isu tersebut dapat kembali ke domestik negaranya. Perasaan termarjinalkan mendorong perempuan Dalit untuk mengekspresikan ketidakpuasan mereka kepada pemerintah. Tidak hanya itu, gerakan ini juga merupakan respons atas 'respons' pemerintah yang abai atas operasi berlapis terhadap perempuan Dalit. Dengan demikian, terdapat keyakinan bahwa dengan mengangkat isu perempuan Dalit di forum internasional, mekanisme institusional negara dapat tercipta.

Indikator pertama *information politics* terpenuhi ketika aktivis perempuan Dalit berupaya menyebarkan informasi kepada publik internasional yang minim pengetahuannya terhadap diskriminasi Dalit. Hal ini merujuk pada aktivitas mereka setelah muncul ke permukaan. Beberapa di antaranya, pada tahun 1998, aktivis perempuan Dalit bersatu untuk membentuk Kampanye Nasional Hak Asasi Manusia Dalit (NCDHR) untuk menarik perhatian publik internasional atas apa yang menimpa komunitas Dalit di India, khususnya perempuan dan anak-anak. (Ingole, 2020). Dalam kampanye tersebut, aktivis memberikan pengalaman diskriminasi tumpang tindih yang menimpa mereka (testimonial). Pada tahun yang sama, Konvensi Dalit Dunia pertama berhasil diadakan di Kuala Lumpur, Malaysia. Konvensi yang dilangsungkan pada bulan Oktober tersebut berupaya mendesak PBB untuk melakukan investigasi pelanggaran hak asasi manusia di India.

NCHDR menjadi cikal bakal terbentuknya jejaring solidaritas transnasional baru bagi komunitas Dalit, International Dalit Solidarity Network (IDSN), yang mempunyai gedung sekretariat di luar negeri untuk pertama kali, yakni di Copenhagen, Denmark. IDSN bertugas dalam membentuk agenda perjuangan hak-hak komunitas Dalit yang kemudian disuarakan ke jaringan solidaritas dunia. Setidaknya terdapat lima lembaga donor untuk IDSN beroperasi, di antaranya Open Society Foundation (Sektor swasta), Departemen Luar Negeri Denmark, Departemen Luar Negeri Norwegia, HEKS/EPER, dan NGOs kemanusiaan Denmark. Jejaring transnasional bagi perempuan Dalit merupakan awal perjuangan skala global mereka. Setahun setelah IDSN resmi berdiri, *The Dalit Women's Movement* memainkan peranan kunci dalam memobilisasi massa dan dukungan mereka dalam Konferensi Dunia PBB. Merujuk pada Keck dan Sikkink, *symbolic politics* diartikan sebagai upaya aktivis dalam mem-*framing* suatu isu dengan memanfaatkan momentum tertentu. Dalam konteks ini, momentum yang digunakan jejaring transnasional aktivis Dalit adalah Konferensi Dunia PBB melawan Rasisme, Diskriminasi Rasial, Xenophobia, dan Intoleransi yang diselenggarakan di Afrika Selatan pada tahun 2001. (Gautam, 2014).

Guna meningkatkan visibilitas, aktivis perempuan Dalit juga beraliansi dengan aktivis kasta rendah dari Nepal dan Sri Lanka selama Konferensi Dunia PBB melawan Rasisme, Diskriminasi Rasial, Xenophobia, dan Intoleransi berlangsung. Tekanan aktivitas advokasi transnasional ini kemudian memaksa Komite PBB dalam menegaskan kembali *General Recommendation of the International Convention* di tahun 2002. Penegasan tersebut meujuk pada bagaimana "diskriminasi" berdasarkan keturunan mencakup diskriminasi terhadap anggota komunitas yang terikat oleh stratifikasi sosial layaknya kasta. Kemajuan ini memberi perempuan Dalit kemenangan awal. Pasalnya, diskriminasi berdasarkan kasta memperoleh makna baru di forum internasional sekelas PBB. All India Dalit Adhikar Manch (All India Dalit Rights Forum), 2007

Indikator ketiga *leverage politics* merujuk pada upaya aktivis dalam memperbesar kekuatan dengan menggaet aktor kuat lainnya. Dalam hal ini, kasus *The Dalit Women's Movement* memenuhi indikator tersebut. Setidaknya, terdapat 15 aktor lain dalam perjuangan gerakan perempuan Dalit, di antaranya sebagai berikut:

1. Human Rights Watch
2. Asian Centre for Human Rights
3. Asian Human Rights Commission
4. Anti-Slavery International
5. The Rafto Foundation
6. Minority Rights Group International
7. Lutheran World Federation
8. ICMICA
9. World Council of Churches
10. IMADR (International Movement Against All Forms of Discrimination)
11. Arisa
12. Forum-Asia
13. Commonwealth Human Rights Initiative
14. Franciscans International
15. Robert Kennedy Memorial Foundation

Pasalnya, advokasi transnasional perempuan Dalit juga menemui titik terang ketika tuntutan dalam Konferensi Beijing tahun 1995 berhasil diakomodasi oleh World Social Forum. Lebih dari itu, aktor dalam advokasi transnasional perempuan Dalit semakin meluas, seperti All India Dalit Women's Rights Forum, Organisasi Feminisme Dalit, International Dalit Solidarity Network, The Dalit Network Netherlands (DNN), National Campaign Dalit on Human Rights, National Federation of Democratic Women mengadakan konferensi HAM di Den Haag, Belanda pada tahun 2006. Keck dan Sikkink (1999) menegaskan bahwa efektivitas yang ingin dicapai melalui tindakan aktivis dapat terlihat ketika perilaku target aktor (pemerintah India) berhasil disoroti oleh pengawasan internasional. (Ingole, P. 2020). Keduanya mengartikan mekanisme ini sebagai "*moral leverage*", yakni mobilisasi rasa malu terhadap target aktor (Keck, Margaret E, & Sikkink, K. (1999). Dalam konteks *The Dalit Women's Movement*, rekognisi internasional atas isu diskriminasi interseksi perempuan Dalit telah membentuk ekspektasi moral di sistem politik India. Pada tahun 2006, Perdana Menteri India, Manmohan Singh, buka suara terkait isu diskriminasi komunitas Dalit dalam Konferensi Internasional Minoritas Dalit. Manmohan berpendapat bahwa "*Untouchability* yang dilekatkan pada kasta Dalit bukan hanya diskriminasi sosial, tetapi juga aib kemanusiaan" (Gautam, 2014).

Merujuk pada indikator keempat, *accountability politics*, jaringan advokasi transnasional perempuan Dalit menggunakan pernyataan Perdana Menteri Manmohan Singh sebagai peluang bagi penyelesaian diskriminasi berdasarkan stratifikasi sosial di India. Misalnya, proyek The Dalit Women's Access to Justice and Dignity (DWAJ) diluncurkan oleh Kementerian Kehakiman India berkolaborasi dengan United Nations Development Programme. Selain itu, aktivis berupaya dalam memastikan kesinambungan antara prinsip dan praktik yang terjadi terhadap minoritas dan komunitas yang termarginalkan di India. Pada praktiknya, Pemerintah India membuka izin bagi investigator resmi PBB untuk melakukan penyidikan HAM di negaranya pada tahun 2007 (Human Rights Watch, 2007).

Keck dan Sikkink (1999) berpendapat untuk mengukur sejauh mana efektivitas proses advokasi transnasional dapat dilihat dari beberapa tahapan. Pertama, *issue creating* dan *agenda setting*, *The Dalit Women's Movement* telah memasuki tahap pembentukan isu dan agenda pada praktiknya. Sebagaimana yang telah dijelaskan di atas, jaringan transnasional membawa isu diskriminasi interseksi karena kelas, kasta, dan gender komunitas Dalit ke forum internasional, seperti PBB agar didengar oleh publik global.

Kedua, *influence on discursive* position dari negara dan organisasi regional maupun internasional. Tahap kedua juga berhasil dicapai oleh gerakan perempuan Dalit, yakni ketika tekanan yang diberikan oleh jaringan aktivis transnasional mendorong pemerintah India untuk menyuarakan isu hak asasi manusia ini di Konferensi Internasional Dalit pertama tahun 2006. Selain itu, organisasi internasional Persatuan Bangsa-bangsa juga memberi makna baru bagi "diskriminasi" dalam *General Recommendation of the International Convention* tahun 2002. Bersama komunitas Dalit Bangladesh, Nepal, dan Sri Lanka, The Hague Declaration on the Human Rights and Dignity of Dalit Women dirilis tahun 2006. Ketiga, jaringan mampu mempengaruhi prosedur internasional, poin ketiga pun dicapai ketika pada akhirnya, prosedur internasional PBB untuk melakukan investigasi hak asasi manusia ke India dilaksanakan pada tahun 2007. Bahkan, satu tahun sebelumnya, 2006, pemerintah India bekerja sama dengan UNDP dalam proyek The Dalit Women's Access to Justice and Dignity (DWAJ). (Yadav, T. 2020).

Keempat, jaringan berhasil mempengaruhi kebijakan, The DALIT Women's Movement juga melawati tahap ini dibuktikan dengan adanya reformasi hukum, peradilan, dan kelembagaan oleh Pemerintah India pada tahun 2009. Reformasi ini merujuk pada peraturan yang berlaku bagi SC & ST (*Scheduled Caste dan Schedule Tribes*), aktivis, dan organisasi HAM untuk membentuk koalisi dalam *National Coalition for Strengthening Scheduled Caste and Schedule Tribes Prevention of Atrocities Act* (NCSIPA). Pada tahun yang sama, *Discrimination based Work and Descent* (DWD) yang diusulkan oleh IDSN berhasil diakui oleh PBB. (Yadav, T. 2020).

Terakhir, jaringan mampu mempengaruhi perilaku negara sejalan dengan arah kebijakan dan posisi yang ditetapkan terhadap perempuan Dalit. Tahap lima juga berhasil dilakukan, yakni setelah lima tahun advokasi berjalan, tepatnya pada 4 Maret 2014, negosiasi dan lobi oleh NCSIPA berhasil membuat Pranab Mukherjee selaku presiden melakukan amandemen di perundang-undangan negaranya. Pada tahun 2015, Rancangan Undang-undang POA berdasarkan pedoman Kementerian Keadilan dan Pemberdayaan Sosial India disahkan oleh parlemen (Yadav, T. 2020).

Kesimpulan

Praktik diskriminasi interseksi atas kelas, kasta, dan gender di India merupakan akar kejahatan terhadap komunitas Dalit, khususnya perempuan. Kegagalan pemerintah dalam mengakui hak-hak dasar dan memberikan perlindungan hukum yang adil menciptakan tekanan eksternal melalui jaringan transnasional. Advokasi transnasional oleh para aktivis yang dilakukan selama bertahun-tahun pada akhirnya membuahkan hasil dengan puncaknya amandemen Undang-Undang POA oleh Lok Sabha di tahun 2015. Sejumlah taktik dilakukan oleh jaringan aktivis lintas negara, di antaranya dengan *agenda-setting*, menyebarkan informasi melalui sesama anggota solidaritas, meningkatkan *public awareness* terkait isu diskriminasi, Dalit melalui forum internasional seperti PBB, menciptakan tekanan moral bagi Pemerintah India, hingga memanfaatkan pernyataan dan posisi pemerintah dalam mengadvokasi isu SC&ST. Selain itu, taktik dalam menggaet aktor-aktor kuat juga dilakukan hingga akhirnya berhasil menciptakan aktivis dari berbagai penjuru dunia, seperti Nepal (Dalit NGO Federation dan The Feminist Dalit Organization), Bangladesh (BDERM), Pakistan (Pakistan Dalit Solidarity Network, dan Dalit Solidarity (Inggris, Norwegia, Finlandia, Jerman, Denmark). Dengan demikian, masyarakat sipil global (*The Dalit Women's Movement*) berhasil memberikan tekanan bagi domestik suatu negara. Bukan hanya itu,

melainkan kerangka kerja masyarakat sipil global juga terbukti efektif dalam mengubah kebijakan dan perilaku pemerintah India.

Daftar Pustaka

- All India Dalit Adhikar Manch (All India Dalit Rights Forum), 2007. *Official Information Booklet*, New Delhi: AIDAM.
- Anheier, H.K., Glasius, M. and Kaldor, M. (2001) *Introducing Global Civil Society*. In: Anheier, H.K., Glasius, M. and Kaldor, M., Eds., *Global Civil Society*, 3-22.
- Bahadur, A. (2020). Speaking is Healing: Dalit Women Gain a Voice through a Charismatic Healing Movement in Nepal. *CASTE: A Global Journal on Social Exclusion*, 1(2), 73–90. <https://www.jstor.org/stable/48643566>.
- Edelman, M. (2001). Social Movements: Changing Paradigms and Forms of Politics. *Annual Review of Anthropology*, Vol. 30, pp. 285–317. <https://doi.org/10.2307/3069218>.
- Gautam, D. D. (2014). VIOLENCE AND DALIT WOMEN IN RURAL UTTAR PRADESH. *The Indian Journal of Political Science*, 75(4), 705–710. <https://www.jstor.org/stable/26575549>.
- GHOSE, S. (2003). The Dalit in India. *Social Research*, 70(1), 83–109. <http://www.jstor.org/stable/40971608>.
- Human Rights Watch, 2007. “*Hidden Apartheid: Caste Discrimination against India’s Untouchables*”. <http://www.chrgj.org/docs/IndiaHiddenApartheidSummary.pdf>.
- Ingole, P. (2020). Intersecting Dalit and Cultural Studies: De-brahmanizing the Disciplinary Space. *CASTE: A Global Journal on Social Exclusion*, 1(2), 91–106. <https://www.jstor.org/stable/48643567>.
- Keck, M E, & Sikkink, K. (1998). *Activists beyond borders: Advocacy networks in international politics*. Cornell University Press
- Keck, Margaret E, & Sikkink, K. (1999). Transnational advocacy networks in international and regional politics. *International Social Science Journal*, 51(159).
- Lerche, J. (2008). Transnational Advocacy Networks and affirmative action for dalits in India. *Development and Change*, 39(2), 239–261. <https://doi.org/10.1111/j.1467-7660.2007.00478.x>.
- Silitonga, Junita Christine (2021) *United Nations Women Dan Isu Perempuan Dalit Di India Tahun 2020-2022*. S1 thesis, Universitas Kristen Indonesia.

Masyarakat Sipil Global dan Aktivisme Transnasional: Studi Kasus "The Dalit Women's Movement" di India

Tamil Nadu Women's Forum (TNWF), 2007. Unheard Voices-Dalit Women, Report submitted to the 70th Session of Committee on the Elimination of Racial Discrimination, Geneva, Switzerland, Januari, Chennai: TNWF.

Thorat, A., Khalid, N., Srivastav, N., Hathi, P., Spears, D., & Coffey, D. (2020). Persisting Prejudice: Measuring Attitudes and Outcomes by Caste and Gender in India. *CASTE: A Global Journal on Social Exclusion*, 1(2), 1–16. <https://www.jstor.org/stable/48643561>.

Yadav, T. (2020). Witch Hunting: A Form of Violence against Dalit Women in India. *CASTE: A Global Journal on Social Exclusion*, 1(2), 169–182. <https://www.jstor.org/stable/48643572>

Zelliot, Eleanor, 2001. *Dalit Traditions and Dalit Consciousness*, in Jayal, Niraja Gopal, and Pai, Sudha (eds), *Democratic Governance in India*, New Delhi: SAGE Publication.